

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia batik sudah ada sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada abad XVIII atau awal abad XIX. Sampai abad XX, semua batik yang dihasilkan adalah batik tulis. Kemudian setelah perang dunia I, batik baru dikenal.<sup>1</sup>

Batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia., memang pada awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton. Hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga, serta pengikutnya.<sup>2</sup>

Batik mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain semisal antara Solo, Yogyakarta dan Pekalongan mempunyai ciri khas yang berbeda – beda. Pada saat ini batik sudah banyak masuk di kalangan industri entah itu industri menengah hingga industri kalangan atas, di era sekarang ini batik merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan, konsumennya atau peminatnya tidak hanya di kalangan domestik saja akan tetapi tidak sedikit dari kalangan mancanegara yang tertarik dengan batik.

---

<sup>1</sup> Asti Musman dan Ambar B. Arini, 2011, *Batik: Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta, ANDI, hal.3

<sup>2</sup> Asti Musman dan Ambar B. Arini, *Op Cit*, hal 4

Di kecamatan Bayat ini ada beberapa perusahaan batik yang menjalin kerjasama dengan individu atau perorangan ataupun dengan badan usaha dalam melakukan pembuatan batik, perjanjian yang dibuat tersebut belum diketahui apakah dibuat dengan tertulis ataupun dengan lisan atas dasar kepercayaan saja.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut biasanya memuat tentang siapa yang bertanggung jawab menyediakan bahan seperti malam, kompor, dan canting, lalu berapa lama pengerjaan batik tersebut, serta berapa upah yang di berikan dari setiap satu potong kain batik yang telah di selesaikan oleh pengrajin, dan apakah ada sanksi apabila pengrajin terlambat dalam menyetorkan kain batik tersebut.

Sedangkan pengertian Perjanjian Kerjasama sendiri adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup> Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdara sehingga tidak memiliki nama khusus. Perjanjian ini hidup dan berkembang di masyarakat berpegang pada asas kebebasan berkontrak.

Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=318962&val=6452&title=PELAKSANAAN%20PERJANJIAN%20KERJASAMA%20ANTARA%20PT.%20SERASI%20AUTORAYA%20DENGAN%20AUDI%20VARIASI> (Diakses pada Selasa,23 Oktober 2018, Pukul 22.07 WIB)

Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar tersebut.

Mengenai “perjanjian” diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: *“suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*. Perjanjian merupakan suatu “perbuatan hukum”. Perbuatan hukum tersebut yang menimbulkan hubungan hukum “perikatan” di antara para pihak sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain dalam suatu hubungan hukum perikatan.<sup>4</sup> Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Perjanjian juga dimuat dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang berbunyi *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”* .

---

<sup>4</sup> Dadang Sukandar, 2012, *Membuat Surat Perjanjian* , Yogyakarta, ANDI, hal.5

Sementara itu tujuan dari suatu perjanjian adalah mengatur antara individu satu dengan individu lain mengenai hubungan hukum yang mana hubungan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak

Prestasi mempunyai arti sebagai berikut Para pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi sulit ditentukan kapan terjadinya, namun KUHPerdara memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1238 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, wanprestasi telah terjadi saat debitur tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

Suatu perjanjian seharusnya memuat 4 ( empat) syarat agar dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk kedua belah pihak. Jika suatu perjanjian ini tidak sesuai dengan keempat syarat yang telah diatur maka tujuan dari suatu perjanjian itu tidak dapat tercapai. Oleh sebab itu keempat syarat tersebut menjadi penting pada saat kita ingin membuat suatu perjanjian agar perjanjian yang kita buat

dikatakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut tentang “PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN PERUSAHAAN BATIK DI KECAMATAN BAYAT”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik di kecamatan Bayat?
- b. Apa akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
  - a. Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik .
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.
2. Manfaat penelitian :
  - a. Manfaat teoritis
    1. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik.

2. Memberikan referensi tentang perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik.

b. Manfaat praktis

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat tentang perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang membuat suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan mengenai perjanjian kerjasama.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Subekti, “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>5</sup>

Menurut asas konsensualitas suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak tersebut.<sup>6</sup>

Wanprestasi, wanprestasi ini mempunyai arti sebagai berikut, para pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu Apabila hal tersebut tidak

---

<sup>5</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hal.36

<sup>6</sup> Subekti, *Op Cit*, hal.26

dilaksanakan maka pihak yang tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Pernyataan lalai sebagai syarat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUHPdata. Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan lalai (*in mora stelling*, *ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya, atau karena keadaan memaksa.<sup>7</sup>

Pengaturan Perjanjian Kerjasama Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPdata. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*.

Sedangkan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.<sup>8</sup>

Perkembangan perindustrian batik ini sudah semakin pesat sehingga para pengusaha atau perusahaan tersebut melakukan perjanjian kerjasama dengan individu untuk menjalankan usahanya tersebut entah kerjasama untuk membuat batik ataupun untuk menjual hasil batiknya

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 340.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102

Terjadinya peningkatan aktifitas perindustrian di bidang tersebut menjadikan para pengusaha berlomba-lomba untuk bersaing dan membuat trobosan agar produksi batik dapat dilakukan dengan cepat untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin ramai yaitu dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan individu atau orang perorangan agar dapat terus bersaing.

Seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Termasuk dalam perjanjian kerjasama yang di lakukan oleh perusahaan batik dengan individu harus sesuai dengan aturan yang sudah tertuang di Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum yang mengikat untuk keduanya dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>9</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian yang demikian adalah semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu.<sup>10</sup> dalam hal ini mengenai perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dan perusahaan batik di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih tempat di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

## 4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 52.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Jakarta Raja Grafindo Persada, hal 26.

- a. Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari proses wawancara dan observasi langsung ke lapangan.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>11</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi referensi-referensi, literatur, buku serta jurnal-jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah :

#### a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen serta penelitian lain yang berhubungan dengan objek penelitian dan data sekunder yang diperlukan di dalam penelitian ini. Yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama.

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Op Cit.*, hal 30.

#### b. Studi Lapangan

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan teknik wawancara kepada perusahaan yang terkait.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian bersifat diskriptif analisis, yaitu analisis terhadap data primer, sekunder dan deskriptif makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>12</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I memuat tentang Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika skripsi .

BAB II memuat tentang tinjauan pustaka tinjauan secara umum mengenai perjanjian dan secara khusus mengenai perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik.

BAB III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya menguraikan secara menyeluruh tentang perjanjian dan perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan batik.

BAB IV memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang di teliti oleh penuli

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 106.